

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
REKRUTMEN DONOR DARAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**



DISUSUN OLEH:

ANDI EDLI

E051 191 032

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN**

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN REKRUTMEN DONOR DARAH DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**ANDI EDLI
E051 191 032**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 31 Januari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si.
NIP. 19570818 198403 1002

Ashar Prawitno, S. IP. M.Si.
NIP. 19900110 201904 3001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

II

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN REKRUTMEN DONOR DARAH DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh


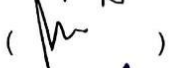




**ANDI EDLI
E051 191 032**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia
ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Selasa, 31 Januari 2023

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

| | | |
|---------------|-------------------------------------|---|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. | () |
| Sekretaris | : Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. | () |
| Anggota | : Dr. A. M. Rusli, M.Si | () |
| Anggota | : Irwan Ade Saputra, S.IP, M.Si. | () |
| Pembimbing I | : Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. | () |
| Pembimbing II | : Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. | () |

III

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Edli
NIM : E051191032
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN REKRUTMEN DONOR DARAH DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Andi Edli

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Rekrutmen Donor Darah Di Provinsi Sulawesi Selatan”**. Tak lupa pula peneliti kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, yang Telah mengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan saat ini.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, peneliti akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk orang tua ibu Hj.

Asnawati dan Bapak Andi Amir yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta adik-adik laki-laki saya Andi Angga yang memberi doa dan semangat dalam melakukan pendidikan. Selanjutnya, kepada Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan rekrutmen donor dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya:
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya:

3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin, S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:
6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada peneliti:
7. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.

8. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) sebagai rumah kedua peneliti yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, dan bersosial di kehidupan kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan.
9. Seluruh teman-teman “ZEITGEIST 2019” yang telah menjadi teman terdekat peneliti selama berada dikampus Ilham, Zaky, Wahyu bos, Viko, Ramlan, Firga, Aldian, Indah A, Venike, Umi Kalsum, Amirul, Andri, Lili Ling, Adam, Lala, Nunu, Andes, Umi Rahayu, Fajri, Vira, Stevany, Inna, Arsel, Puput, Ibnu, Ila, Febrin, Okta, Pute, Mapparessa, Tisa, Nisa, Eki, Indah P, Ulfi, Elisa, Diyah, Hafiqi, Rafly, Asrul.
10. Seluruh teman–teman angkatan 2019 S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
11. Seluruh teman-teman PMR SMAN 11 Makassar Angkatan 18 yang telah menemani dalam kepengurusan Acik, Mita, Babet, Amna, April, Uswa, Faisal, Yudha, Akbar, Rian.
12. Seluruh teman-teman di Social Care Community (SCC) yang menjadi wadah untuk mengekspresikan jiwa sosial peneliti, yaitu Egi, Habibi, Ince, Acce, Adli, Anggun, Ditha, Nuri, Nurisno, Pati, Puput, Hadelina, Randy, Rara, Sarah, Tri.
13. Seluruh teman-teman diorganisasi yang pernah peneliti tempati berproses dan belajar menempah diri OSIS SMAN 11 Makassar, PMR SMAN 11 Makassar, PMR SMP 24 Makassar,

Forum Osis Setingkat SMA Se-Kota Makassar (FORSISMA),
Forum Remaja Palang Merah Makassar (FORPIS), Social
Care Community (SCC), Keluarga Mahasiswa FISIP Unhas,
Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM).

14. Annisa Fauziah Lawi terima kasih telah menjadi partner
sekaligus *support system* peneliti dalam setiap makna proses
yang dilalui bersama dalam proses penyusunan skripsi ini
sehingga dapat selesai dengan hasil yang baik.
15. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)
Desa Wisata Desa Cenrana Baru Maros 4 Gelombang 108
Makassar

31 Januari 2023

Andi Edli

E051191032

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMPUL..... | I |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | II |
| LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI..... | III |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | IV |
| KATA PENGANTAR..... | V |
| DAFTAR ISI..... | X |
| DAFTAR TABEL..... | XIII |
| DAFTAR GAMBAR..... | XIV |
| ABSTRAK..... | XV |
| ABSTRACT..... | XVI |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1. Peran Pemerintah Daerah..... | 9 |
| 2.1.1. Peran..... | 9 |
| 2.1.2. Pemerintah Daerah..... | 11 |
| 2.2. Implementasi Kebijakan Rekrutmen Donor..... | 16 |
| 2.2.1. Implementasi..... | 16 |
| 2.2.2. Kebijakan..... | 18 |
| 2.2.3. Implementasi Kebijakan..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.4. Rekrutmen Donor..... | 21 |
| 2.3. Kerangka Konsep..... | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 30 |
| 3.1. Pendekatan dan Strategi Penelitian..... | 30 |
| 3.2. Lokasi Penelitian..... | 32 |
| 3.3. Fokus Penelitian..... | 33 |
| 3.3.1 Peran UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Implementasi Kebijakan Rekrutmen Donor..... | 34 |
| 3.3.2. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan Rekrutmen Donor..... | 41 |
| 3.4. Sumber Data..... | 41 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| 3.6. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... | 46 |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 46 |
| 4.1.1. Provinsi Sulawesi Selatan..... | 46 |
| 4.1.2. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan..... | 51 |
| 4.1.3. UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan..... | 60 |
| 4.2. Pembahasan dan Hasil Penelitian..... | 75 |
| 4.2.1. Peran UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Implementasi Kebijakan Rekrutmen Donor..... | 76 |
| 4.2.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi | |

| | |
|--|------------|
| Kebijakan Rekrutmen Donor..... | 108 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 125 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 125 |
| 5.2. Saran..... | 127 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 129 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 132 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------------|--|-----|
| Tabel 1 | Data permintaan dan ketersediaan darah di Dinas Kesehatan UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan..... | 3 |
| Tabel 2 | Data Permintaan Darah Tahun 2021 UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan..... | 78 |
| Tabel 3 | Data Pengeluaran Darah Tahun 2021 UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan..... | 79 |
| Tabel 4 | Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Unit Kerja..... | 102 |
| Tabel 5 | Jumlah Sarana dan Prasarana UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan..... | 106 |
| Tabel 6 | Rekapitulasi Anggaran Pertahun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan..... | 107 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1 Peta Wilayah Administratif Prov. Sulawesi Selatan..... | 48 |
| Gambar 2 Struktur Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan..... | 58 |
| Gambar 3 Struktur UPT Dinas Kesehatan Prov.Sulawesi Selatan..... | 63 |
| Gambar 4 Jadwal Pelaksanaan Mobile Unit (Donor Darah) UPT Transfusi Darah..... | 81 |
| Gambar 5 Sosialisasi dan kegiatan donor darah UPT Transfusi Darah... | 83 |
| Gambar 6 Formulir pencatatan donor UPT Transfusi Darah..... | 98 |
| Gambar 7 Dokumentasi Gubernur Sulawesi Selatan memantau kegiatan Donor Darah..... | 110 |
| Gambar 8 Dokumentasi kerja sama pihak UPT Transfusi Darah dengan pihak Swasta..... | 114 |
| Gambar 9 Dokumentasi Kepala Seksi Teknis Pelayanan Donor UPT Transfusi Darah..... | 116 |
| Gambar 10 Standar Bangunan dan Fasilitas Yang Digunakan Untuk Pengambilan Darah..... | 120 |

ABSTRAK

ANDI EDLI, Nomor Induk Mahasiswa E051191032, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Rekrutmen Donor Darah Di Provinsi Sulawesi Selatan”**, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. selaku pembimbing pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam implementasi rekrutmen donor dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi rekrutmen donor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian naratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian, dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa UPT Transfusi Darah sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam implementasi rekrutmen donor darah memiliki beberapa indikator peran, yaitu (1) sosialisasi informasi dan edukasi yang disediakan untuk pendonor, (2) mengatur kriteria sasaran rekrutmen donor dan jenis pendonor, (3) melakukan surveilans epidemiologi, (4) melakukan registrasi atau pencatatan donor, dan (5) memperhatikan faktor penentu keberhasilan donor. Dari beberapa indikator tersebut, ditemukan bahwa pelaksanaan peran UPT Transfusi Darah masih belum optimal. Hal ini didasari oleh peningkatan permintaan darah yang semakin tinggi berbanding terbalik dengan jumlah permintaan darah yang dipenuhi. Berdasarkan hasil analisis dari data primer dan data sekunder, peneliti mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat mendorong keberhasilan rekrutmen donor, yaitu pihak UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan harus memperbanyak sosialisasi, memiliki data wilayah dengan risiko rendah dan tinggi untuk donor darah, melakukan penambahan bidang kerja yang secara khusus menjalankan surveilans epidemiologi, menambah Sumber Daya manusia (SDM), melakukan pengajuan anggaran tambahan disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Darah, Rekrutmen Donor, Peran, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

ANDI EDLI, Student Identification Number E051191032, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "**The Role of Local Government in the Implementation of Blood Donor Recruitment Policy in South Sulawesi Province**", under the guidance of Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si. as the Main Advisor and Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. as Advisors.

The purpose of this research is to determine the government's role in the implementation of donor recruitment and the factors that influence the implementation of donor recruitment. This research uses a qualitative approach with a narrative research strategy. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The data obtained was then analyzed through several stages, such as, data reduction, data presentation, and conclusions.

The research results obtained show that the UPT Transfusi Darah as one of the local government instruments in implementing the recruitment of blood donors has several role indicators, namely, (1) dissemination of information and education provided to donors, (2) organizing target criteria for donor recruitment and types of donors, (3) carry out epidemiological surveillance, (4) register or record donors, and (5) pay attention to the determinants of donor success. From some of these indicators, it was found that the implementation of the role of UPT Transfusi Darah was still not optimal. This is based on an increase in blood demand which is inversely proportional to the number of blood requests fulfilled. Based on the results of analysis of primary and secondary data, the writer identified several solutions that could encourage the success of donor recruitment, namely, the UPT Blood Transfusion Department of Health had to increase socialization, hold data on areas with low and high risk for blood donors, add work fields that specifically carrying out epidemiological surveillance, increasing human resources (HR), submitting additional budgets accompanied by improving facilities and infrastructure.

Keywords: Blood, Donor Recruitment, Role, Local Government

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Darah adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam tubuh manusia, untuk menjadikan tubuh manusia bekerja secara baik maka dibutuhkan komponen yang dapat mengatur sistem peredaran dalam tubuh manusia. Darah dalam tubuh manusia memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sistem transportasi yang mengedarkan zat makanan dan oksigen serta mengeluarkan zat sisa dan karbon dioksida dalam tubuh manusia. Darah juga berperan sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri yang bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius. Kesehatan adalah bagian penting yang paling berharga bagi manusia dan semua orang mendambakan hidup sehat. Kesehatan, yaitu salah satu faktor penting untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, kesehatan tidak boleh diremehkan dengan siapa pun karena tidak ada seseorang menginginkan untuk sakit, baik itu secara rohani maupun jasmaninya. Terciptanya masyarakat yang sehat merupakan impian setiap pemerintah daerah karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawab dan perannya selaku fasilitator terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, kesehatan merupakan salah satu prioritas utama mereka untuk tujuan tercapainya program-program dalam pembangunan, sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat baik fisik maupun rohaninya.

Donor darah pada dasarnya merupakan kegiatan dari transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa manusia dalam beberapa situasi, seperti kehilangan darah dalam jumlah besar, atau dapat digunakan untuk menggantikan darah yang hilang selama operasi.

Permintaan darah pada praktik klinis meningkat dari tahun ke tahun. Transfusi darah secara universal dibutuhkan untuk menangani pasien anemia berat, pasien dengan kelainan darah bawaan, pasien yang mengalami kecederaan parah, pasien yang hendak menjalankan tindakan bedah operatif, pasien yang mengalami penyakit liver ataupun penyakit lainnya yang mengakibatkan tubuh tidak dapat memproduksi darah atau komponen darah sebagaimana mestinya. Transfusi darah juga diperlukan untuk menangani kondisi darurat dalam persalinan dan anak-anak malnutrisi yang berujung pada anemia berat terutama pada negara berkembang (WHO, 2007: 1).

Sulawesi Selatan sebagai Provinsi yang cukup padat penduduknya di Indonesia, yaitu terpadat keenam dan menempati posisi pertama sebagai wilayah terpadat dipulau Sulawesi tentu hal ini membuat Sulawesi Selatan memiliki permintaan darahnya cukup tinggi berdasarkan data ditahun 2019 permintaan darah rata-rata 11.610 kantong setahun.

Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah satu-satunya tempat pelayanan darah di bawah naungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam kegiatannya saat ini melayani kebutuhan darah dari rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta yang ada di sekitar wilayah Provinsi Sulawesi selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pelayanan UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1
Data Permintaan dan Ketersediaan Darah di Dinas Kesehatan UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1. | Permintaan darah yang masuk | 5.289 Pasien |
| 2. | Pasien yang dilayani | 4.370 Pasien |
| 3. | Kantong darah yang tersedia | 17.573 Kantong |

Sumber : *Journal of Muslim Community Health (JMCH)* Rusmini, Samsu alam, Reza Aril Ahri. 2019

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan darah di UPT Transfusi darah akibat kurangnya pendonor darah yang mendonorkan darahnya secara sukarela. (*Journal of Muslim Community Health (JMCH)* Rusmini, Samsu alam, Reza Aril Ahri. 2019: 19)

Sampai sekarang, masih terdapat beberapa keluhan dari pasien serta keluarga pasien yang diterima oleh pihak UTD baik

secara langsung maupun tidak langsung. Dari hasil wawancara langsung kepada beberapa konsumen (keluarga pasien), yaitu >50% konsumen / pelanggan mengeluhkan stok darah yang tidak tersedia. (*Journal of Muslim Community Health (JMCH)* Rusmini, Samsu alam, Reza Aril Ahri. 2019: 20)

Dari data yang ada dapat dilihat jumlah kebutuhan darah lebih banyak dari jumlah darah yang tersedia di UPT Transfusi Darah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi Darah Setiap Unit Transfusi Darah (UTD) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan darah di wilayah kerjanya atau jejaring. Ketersediaan darah sangat tergantung kepada kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela dan teratur. Untuk mencapai hal tersebut UTD perlu melakukan kegiatan rekrutmen donor yang meliputi upaya sosialisasi dan kampanye donor darah sukarela, pengerahan donor serta pelestarian donor. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91. 2015. Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah: 44)

Pelaksanaan rekrutmen donor oleh UPT Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan ini juga diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Transfusi Darah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang pada Tugas dan

Uraian Tugas Kepala Seksi Teknis Pelayanan Donor dan Pasien pada uraian tugas bagian (f) yang berbunyi menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan rekrutmen donor dan pelestarian donor darah, dan bagian (g) yang berbunyi menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan rekrutmen donor dan pelestarian donor darah. (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Transfusi Darah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan:7)

Target utama rekrutmen donor adalah diperolehnya jumlah darah sesuai dengan kebutuhan atau target UTD yang difokuskan terhadap pendonor darah sukarela risiko rendah. Ketersediaan darah yang aman dan bermutu selain ditentukan oleh pemeriksaan serologi IMLTD juga sangat dipengaruhi oleh rekrutmen donor yang tepat dan terarah. Berbagai upaya dapat dilakukan UTD untuk menjangkau ketersediaan darah tersebut, diantaranya dengan membangun jejaring, menghidupkan komunikasi serta kerja sama dengan semua komponen masyarakat. Keikutsertaan dinas atau instansi terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah yang harus terpenuhi. Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan darah, jangkauan kerja sama jejaring diperluas sampai ke daerah perifer yang meliputi Puskesmas dan jejaringnya. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91. 2015. Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah: 44)

Dengan melihat realita yang terjadi bahwa jumlah kebutuhan darah di UPT Transfusi Darah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi selatan masih tidak sebanding dengan jumlah darah yang tersedia, maka dari masalah tersebut perlu dilihat bagaimana peran UPT Transfusi Darah dalam melakukan rekrutmen donor maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN DONOR DARAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam implementasi kebijakan rekrutmen donor?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan rekrutmen donor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi selatan dalam melakukan rekrutmen donor
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam melakukan rekrutmen donor

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan rekrutmen donor .

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam implementasi rekrutmen donor, terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini, terkait hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka upaya implementasi kebijakan rekrutmen donor.

3. Manfaat Metodologis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah. Kemudian, bisa di bandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mempelajari peranan pemerintah dalam implementasi kebijakan rekrutmen donor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Pemerintah Daerah

2.1.1 Peran

Peran berasal dari kata “peran” yang artinya, merupakan bagian dari atau memiliki pimpinan utama. Peranan atau *role* juga diartikan sebagai perilaku yang diharapkan seseorang dalam hubungan sosial tertentu yang berkaitan dengan status sosial tertentu. Peran merujuk pada kelompok yang kurang lebih berperilaku homogen, yang didefinisikan oleh norma dan diharapkan oleh warga dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada persepsi dan ekspektasi peran, yang menjelaskan apa yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk mencapai ekspektasi perannya atau ekspektasi lainnya.

Menurut Levinson (2002: 200) yang dikutip dalam Soedjono (2002: 200), peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seorang individu, sangat penting bagi struktur sosial masyarakat, termasuk peran yang berkembang sesuai dengan status atau status individu. status dalam masyarakat Norma, dalam pengertian ini, peran adalah serangkaian aturan yang memandu kehidupan sosial masyarakat. Peran artinya, ketika seseorang memasuki komunitas dalam skala kecil

(keluarga) dan skala besar (komunitas besar), setiap orang harus belajar memainkan peran tertentu. Peran sosial yang perlu dikaji meliputi dua aspek, yaitu belajar memenuhi kewajiban dan menuntut hak dari peran tersebut, serta memiliki sikap, perasaan dan harapan yang sesuai dengan peran tersebut.

Merton dari Raton mengungkapkan bahwa peran diartikan sebagai cara berperilaku yang diharapkan masyarakat terhadap seseorang untuk mengambil posisi atau posisi tertentu (Raho, 2007: 67). Oleh karena itu, peran adalah keutuhan hubungan yang terbentuk akibat peran individu dalam status sosial masyarakat.

Scott dkk. Dalam Kanfer, dia menyebutkan lima aspek penting dari peran tersebut, sebagai berikut:

- 1) Peran adalah impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan ekspektasi, bukan individu
- 2) Peran terkait dengan perilaku kinerja (*task behavior*), yang diharapkan dalam pekerjaan tertentu
- 3) Peran sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
- 4) Dapat mempelajari peran dengan cepat, dan dapat menyebabkan beberapa perubahan perilaku yang besar
- 5) Peran non-kerja (*jobs*) tidak sama, dan orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan dapat memainkan peran ganda (Kanfer, 1987: 197).

2.1.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah sekumpulan orang yang mengatur kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan masyarakat pada lembaga tempatnya berada. Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk memelihara sistem ketertiban sosial dan memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang normal. Dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya permintaan, maka peran pemerintah pun berubah menjadi melayani masyarakat. Intinya, pemerintahan modern adalah pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan pemerintahan bukan untuk melayani diri sendiri tetapi, untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi agar setiap anggota dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya sendiri-sendiri untuk mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2011: 13). Osborne dan Geabler yang dikutip oleh Rasyid (2011: 19) mengemukakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warga negara, karena tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warga negara.

Oleh karena itu, pemerintahan dapat dilihat dari banyak aspek penting, seperti kegiatan struktur fungsional dan tanggung jawab yang berwenang. Kegiatan pemerintahan melibatkan semua kegiatan yang

diselenggarakan berdasarkan kedaulatan dan landasan negara, yang melibatkan rakyat dan negara serta tujuan bernegara. Struktur fungsional memperlakukan pemerintah sebagai seperangkat fungsi nasional yang saling terkait. Untuk memainkan peran dan menjalankan fungsinya atas dasar tertentu untuk tujuan negara. Pada saat yang sama, tanggung jawab dan wewenang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan nasional secara keseluruhan yang dijalankan oleh pemerintah.

Hal lain tentang C.F Strong adalah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang menjalankan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Secara garis besar, pemerintah lebih besar dari pada institusi atau organisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Indonesia terbagi atas daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota.

Kemudian, pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Kewenangan mengawasi dan mengurus keluarga meliputi tiga isi pokok: Pertama, menyelesaikan penugasan dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, memberi kepercayaan dan kekuatan untuk berpikir, berinisiatif untuk bertindak dan menentukan cara untuk menyelesaikan tugas; ketiga, berpikir keras, berinisiatif dan mengambil keputusan, melibatkan masyarakat secara langsung, dan berpartisipasi bersama DPRD.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau

dalam bentuk yang ekstrem, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan *Laissez Faire* namun, ada pula negara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli :

1) Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

2) Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini

adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3) Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

4) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai *skill* dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

2.2. Implementasi Kebijakan Rekrutmen Donor

2.2.1. Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah

digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:65)

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan

yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.2.2. Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara. (Dunn, 2007: 51).

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk

menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. “ (Indiahono, 2009: 18).

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan”(Abidin, 2008: 25).

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. (Abidin, 2008: 25).

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

2.2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sah. Sedangkan kebijakan adalah sesuatu pemikiran atau perencanaan yang dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif, seperti undang-undang dan aturan yang kemudian, dilaksanakan atau diimplementasikan.

Budi Winarno, mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.2.4. Rekrutmen Donor

Rekrutmen donor adalah kegiatan yang meliputi upaya sosialisasi dan kampanye donor darah sukarela, pengerahan donor serta pelestarian donor. Target utama rekrutmen donor adalah diperolehnya jumlah darah sesuai dengan kebutuhan atau target UTD yang difokuskan terhadap pendonor darah sukarela risiko rendah. Pemerintah daerah melalui UPT Transfusi Darah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam implementasi

rekrutmen donor, dalam pelaksanaan rekrutmen donor pemerintah berperan sebagai badan yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan rekrutmen donor ini tentu ada hal yang harus diperhatikan sehingga pelaksanaan rekrutmen donor ini dapat terlaksana dengan baik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah pada bab III halaman 44 tentang rekrutmen donor dijelaskan bahwa Setiap Unit Transfusi Darah (UTD) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan darah di wilayah kerjanya atau jejaring. Ketersediaan darah sangat tergantung kepada kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela dan teratur.

Untuk mencapai hal tersebut UTD perlu melakukan kegiatan rekrutmen donor yang meliputi upaya sosialisasi dan kampanye donor darah sukarela, pengerahan donor serta pelestarian donor. Target utama rekrutmen donor adalah diperolehnya jumlah darah sesuai dengan kebutuhan atau target UTD yang difokuskan terhadap pendonor darah sukarela risiko rendah. Ketersediaan darah yang aman dan bermutu selain ditentukan oleh pemeriksaan serologi IMLTD juga sangat dipengaruhi oleh rekrutmen donor yang tepat dan terarah. Berbagai upaya dapat dilakukan UTD untuk

menjaring ketersediaan darah tersebut, diantaranya dengan membangun jejaring, menghidupkan komunikasi serta kerja sama dengan semua komponen masyarakat. Keikutsertaan dinas atau instansi terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah yang harus terpenuhi. Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan darah, jangkauan kerja sama jejaring diperluas sampai ke daerah perifer yang meliputi Puskesmas dan jejaringnya. Hal tersebut untuk mendukung terlaksananya program Perencanaan, Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Puskesmas. Diharapkan dengan terlaksananya program tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu di wilayah setempat.

Dalam pelaksanaan rekrutmen donor ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pelaksanaan dan hasil dari rekrutmen donor ini dapat berjalan dengan maksimal, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

- **Informasi atau Edukasi yang harus Disediakan untuk Pendonor**

Informasi dan edukasi merupakan strategi penting dalam rekrutmen donor. Strategi yang tepat merupakan kunci keberhasilan rekrutmen donor. Tujuan edukasi adalah untuk merubah pemahaman dan perilaku masyarakat dalam hal:

1. Manfaat darah pentingnya mendonasikan darah secara sukarela dan teratur.

2. Perilaku berisiko yang dapat mempengaruhi keamanan dan mutu darah.

- **Kriteria Sasaran Rekrutmen Donor dan Jenis pendonor darah**

Berdasarkan motivasi donor hanya terdapat empat jenis donor yang diperbolehkan:

1. Donor sukarela

Adalah pendonor yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kehendaknya dan tidak menerima pembayaran, baik dalam bentuk tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang. Hal ini termasuk izin tidak masuk kerja, kecuali jika diperlukan waktu yang masih dianggap wajar untuk perjalanan ke tempat penyumbangan darah. Pendonor sukarela dapat diberikan hadiah kecil, makanan dan minuman serta penggantian biaya transportasi langsung dalam keadaan tertentu.

2. Donor keluarga/pengganti

Adalah pendonor yang memberikan darahnya ketika dibutuhkan oleh anggota keluarganya atau masyarakat.

3. Donor bayaran

Adalah pendonor yang memberikan darah dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar atau sesuatu yang dapat dijual atau dapat ditukarkan ke dalam uang tunai atau ditransfer ke orang lain.

4. Donor plasma khusus

Adalah pendonor plasmapheresis untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan derivat plasma melalui fraksionasi. Pendonor merupakan pendonor sukarela namun, dapat diberikan kompensasi berupa penggantian biaya transportasi langsung dan/atau pelayanan pemeliharaan kesehatan.

Rekrutmen donor ditujukan di wilayah pendonor dengan kelompok risiko rendah, tidak dianjurkan dilakukan rekrutmen donor darah di wilayah dengan kelompok populasi:

1. Dengan tingkat permasalahan gizi yang kurang baik yang khususnya berpengaruh terhadap kasus jumlah anemia yang tinggi.
2. Di daerah yang sedang terjadi wabah penyakit.
3. Di tempat dengan populasi angka penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui darah yang tinggi misalnya di lembaga pemasyarakatan, tempat rehabilitasi atau

populasi kelompok masyarakat tertentu yang berperilaku risiko tinggi.

- **Surveilans Epidemiologi**

UTD harus senantiasa melakukan pemetaan surveilans epidemiologi untuk memperoleh (database) wilayah-wilayah yang teridentifikasi berisiko terhadap keamanan dan mutu darah. Data surveilans epidemiologi mengacu kepada data dinas kesehatan setempat.

- **Registrasi**

Salah satu bagian yang terpenting dari rekrutmen donor adalah pencatatan. Pencatatan ini meliputi catatan donor yang ditolak, catatan donor yang menunda sendiri mendonorkan darahnya, donor dengan riwayat hasil uji saring IMLTD reaktif pada donor darah sebelumnya, catatan donor khusus (donor dengan Rhesus negatif dan sebagainya).

- **Faktor Penentu Keberhasilan Rekrutmen Donor**

1. Perencanaan

Unit Transfusi Darah harus membuat perencanaan yang tepat berdasarkan:

- a. perkiraan jumlah darah yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu di wilayah setempat dan jejaring
- b. jumlah dan kelas Rumah Sakit
- c. jenis penyakit

d. kondisi darurat.

Atas dasar perkiraan tersebut, UTD menyusun strategi rekrutmen dan jadwal rekrutmen donor.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan rekrutmen donor harus mempunyai kompetensi dan jumlahnya yang memadai berdasarkan area jangkauan.

3. Pembiayaan

Setiap UTD harus mengalokasikan biaya rekrutmen donor yang diperuntukkan bagi ketersediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan.

4. Metode

Pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan rekrutmen. Metode rekrutmen dapat menggunakan media elektronik, media cetak maupun melalui kontak langsung berupa ceramah.

a. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk rekrutmen donor, yaitu leaflet, brosur, spanduk, banner, alat edukasi audio visual.

b. Pemeriksaan atas kepatutan donor

Untuk menyumbangkan darahnya harus dibuat dengan jalan memperhitungkan keadaan umum, jawaban terhadap pertanyaan tentang kesehatan, riwayat kesehatan dan faktor risiko potensial terkait gaya hidup dan beberapa pemeriksaan sederhana.

2.3. Kerangka Konsep

